



PBB di DIY Tak Naik

BANTUL—Sejumlah pemerintah kabupaten/kota di DIY memastikan tidak ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayahnya.

David Kurniawan, Stefani Yulindriani,
Andre Yuda Pramono
redaksi@harianjogja.com

Bahkan di Kabupaten Bantul, pada 2026 justru akan membebaskan pajak bagi pemilik lahan produktif. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih memastikan tidak menaikkan tarif

▶ Bantul memastikan tidak menaikkan tarif PBB pada 2025 dan 2026.

▶ Kenaikan PBB di Kota Jogja terakhir kali dilakukan pada 2020.

PBB pada 2025 dan 2026.

Menurut dia, tarif PBB yang dibebankan bagi wajib pajak atau masyarakat tetap seperti biasa. Bahkan khusus pemilik lahan pertanian produktif yang masuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Pemkab Bantul malah

akan membebaskannya dari PBB.

"Kami malah akan mengonkkan pajak lahan sawah produktif, dan ini berbeda kan," kata Bupati, Jumat (15/8).

Menurut dia, langkah pembebasan PBB bagi lahan pertanian berkelanjutan tersebut, selain untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, juga mempertahankan lahan pertanian produktif untuk pengoptimalan hasil pertanian pangan.

Di Sleman, Pemkab memastikan tidak ada kenaikan meski target PAD dari PBB-P2 naik.

Badan Keuangan dan Aset Daerah

(BKAD) Sleman menyampaikan ada penambahan target pendapatan dari PBB P2 di APBD Perubahan 2025, dari Rp80,4 miliar menjadi Rp84 miliar atau naik Rp3,6 miliar.

Kepala BKAD Sleman, Abu Bakar, mengatakan kenaikan tersebut merupakan kenaikan target penerimaan, yang berasal dari potensi tunggakan piutang wajib pajak yang dilakukan upaya penagihan oleh BKAD, bukan kenaikan pajak PBB P2 seperti yang terjadi di beberapa kabupaten/kota lain.

▶ Halaman 11

PBB di DIY...

"PBB P2 tetap, tidak ada perubahan sejak awal tahun. Kalau yang terjadi di Kabupaten Pati itu kan ketetapan pajaknya yang naik," kata Abu Bakar.

Abu mengaku BKAD bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Sleman melakukan penagihan terhadap wajib pajak. Tambahan pendapatan pajak akan sangat membantu untuk sejumlah program pembangunan di Bumi Sembada.

Lebih jauh, Abu menjelaskan BKAD Sleman juga sedang membahas ketetapan PBB P2 untuk 2026. Target pendapatan dari PBB P2 naik cukup signifikan. Belum ada kepastian ihwal rencana kenaikan ini. Dia juga belum tahu apakah akan ada kenaikan massal nilai jual objek pajak (NJOP) atau tidak.

Biasanya, kenaikan NJOP terjadi secara parsial. Misalnya tanah kosong lalu ada bangunannya atau bangunan berubah menjadi lebih besar seperti mal atau hotel, atau sawah dikeringkan dan diubah menjadi perumahan.

Pendapatan Daerah

Kondisi yang sama juga terjadi di Kota Jogja.

Kepala Bidang Pembukuan Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, BPKAD Kota Jogja, Kisbiyantoro, menyebut kenaikan PBB di Kota Jogja terakhir kali dilakukan pada 2020.

"Nilai Jual Objek Pajak [NJOP] PBB-P2 tetap sama seperti 2024. Hanya stimulus atau pengurangan yang dikurangi," katanya.

Tahun ini Pemkot Jogja menargetkan pendapatan daerah dari PBB-P2 mencapai Rp130 miliar. Hingga Juli 2025 realisasi PBB-P2 telah mencapai 59,22% dari target 58,33%.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah, BPKAD Kota Jogja, Muhammad Rohmad menyampaikan target PBB-P2 tahun ini juga meningkat dibandingkan tahun lalu.

Tahun lalu, target PBB-P2 Kota Jogja Rp118 miliar. Target tersebut pun tercapai. Kenaikan target tersebut menambah pendapatan daerah bagi Kota Jogja.

Dia mengaku kenaikan target tersebut disebabkan ada penambahan wajib pajak baru. Selain itu ada beberapa lahan atau bangunan yang menjadi

objek pajak mengalami perubahan bentuk, sehingga pajak yang dikenakan juga disesuaikan.

"Memang kesadaran [membayar PBB-P2] sudah cukup tinggi, tidak harus dibayar akhir jatuh tempo, tapi rata-rata objek pajak membayar [PBB-P2] menjelang jatuh tempo tahun yang bersangkutan," katanya.

Adapun, Pemkab Gunungkidul juga memastikan tidak ada menaikkan besaran PBB-P2 di tahun ini. Meski begitu, masyarakat diingatkan soal sanksi denda jika terlambat membayar.

"Hingga pertengahan Agustus, realisasi penerimaan PBB di Gunungkidul mencapai Rp16,6 miliar," kata Kepala BKAD Putro Supto Wahyono.

Dia menjelaskan untuk ketetapan nilai pajak dibebankan tidak naik karena melihat situasi kondisi di masyarakat dan fakta bahwa kondisi perekonomian sedang lesu.

Kenaikan PBB-P2 di sejumlah daerah menimbulkan pro dan kontra. Bahkan di Pati, kenaikan menimbulkan aksi demo yang berujung kerusuhan.

Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 20 daerah yang mengerek tarif PBB-P2 di atas 100%.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005